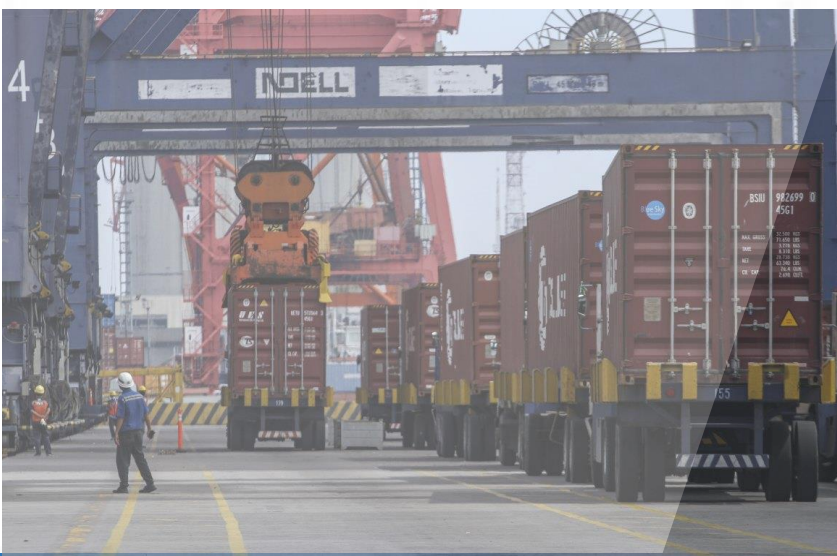




Shinta W. Kamdani

Ketua Dewan Pimpinan Nasional Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO)

AIPI

Merumuskan Posisi dan Peran Negara, Pasar, dan Masyarakat Sipil dalam Memperkuat Demokrasi Indonesia

Tantangan Pelaku Pasar terkait Korupsi, Birokrasi, dan Politik Transaksional



**ASOSIASI
PENGUSAHA
INDONESIA**

Kinerja Perekonomian yang baik saat ini adalah berkah dari keterbukaan ekonomi Indonesia

Pemerintahan
SBY



Konsistensi deregulasi untuk mendukung ekonomi pasar

2004

UU Penanaman Modal
No 25/2007

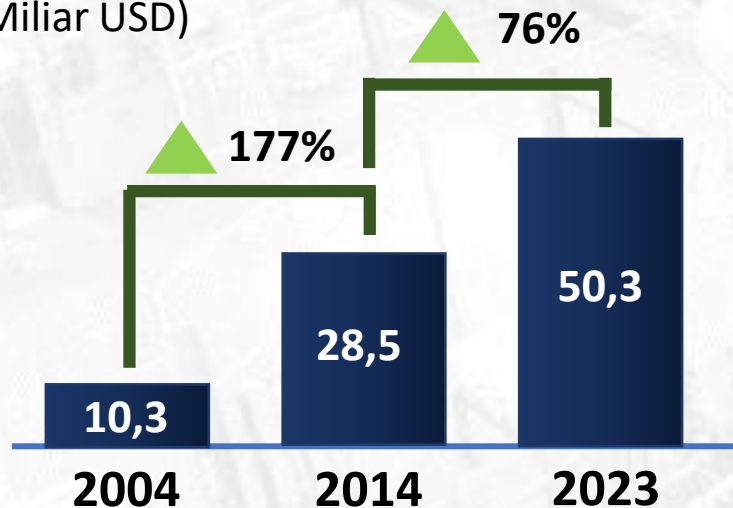
Perbaikan iklim usaha

Reformasi regulasi sektor
keuangan

MP3EI

Penanaman Modal Asing

(Miliar USD)



2004-2012

8 tahun Kinerja
Ekonomi Nasional

2014-2022

▲ 275%

PDB

▲ 85%

▲ 231%

Pendapatan
Negara

▲ 68%

▲ 52%

Utang

▲ 196%

▼ 5%

Angka
Kemiskinan

▼ 1,35%

▼ 3,73%

Pengangguran

▲ 0,22%

 Indonesia saat ini:
Terbesar ke 16 di dunia
(PDB) US\$ 1,4 triliun

Infrastructure development
yang menjadi prioritas dalam
10 tahun terakhir akan
dirasakan dampak &
kebermanfaatan dalam waktu
kedepan.

Dunia usaha menilai mekanisme pasar hanya bisa berjalan beriringan dengan demokratisasi politik

Transparansi dan akuntabilitas pemerintah



Partisipasi publik dalam pengambilan keputusan



Partisipasi terhadap hak asasi dan kebebasan individu



Stabilitas sosial dan politik



Regulasi yang adil dan konsisten



Pengawasan dan penegakan hukum yang efektif



Benchmarking...

Negara paling demokratis (Democracy Index/2023)

	Democracy Index	GDP Per Capita
1. Norway	9.81	\$94,660
2. New Zealand	9.61	\$48,530
3. Iceland	9.45	\$84,590
4. Sweden	9.39	\$58,530
5. Finland	9.30	\$55,130

Demokratisasi Politik



Kinerja Ekonomi & Kesejahteraan

Sayangnya Indonesia masih dalam kategori *flawed democracies* (demokrasi cacat)

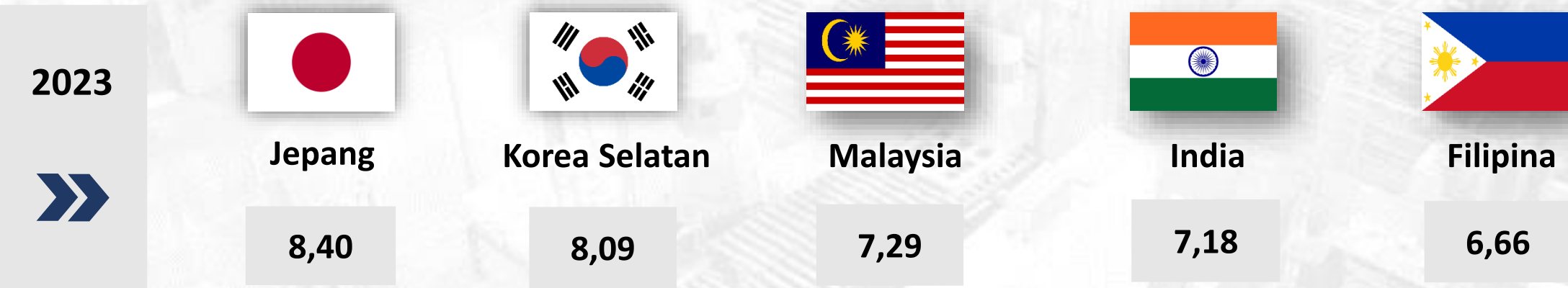


Perkembangan dari tahun ke tahun...



**>8 (full democracy), >6 - ≤8 (flawed democracy), >4 - ≤6 (hybrid regime), ≤4 (authoritarian)

Dibandingkan negara-negara Asia, Indonesia masih dibawah...



Dunia usaha menilai kondisi demokrasi politik Indonesia menantang bagi pasar

1



Korupsi

2



Birokrasi

3



Politik Transaksional

Peringkat

115

Indonesia turun dalam peringkat Indeks Persepsi Korupsi (IPK) global (2023)

Skor

38

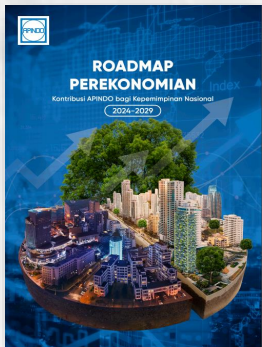
Peringkat

73

Government Effectiveness Index (penilaian kinerja & efektivitas pemerintah)

Skor

66,04/100



SURVEI ROADMAP PEREKONOMIAN APINDO 2024-2029

13,8%

Tata kelola pemerintahan telah dijalankan berdasarkan prinsip transparansi dan akuntabilitas

Kondisi demokrasi politik Indonesia menantang bagi pasar (1): Korupsi

Penindakan Kasus Korupsi

Penindakan Korupsi:

533 kasus
579 kasus
791 kasus

2021 **2022** **2023**

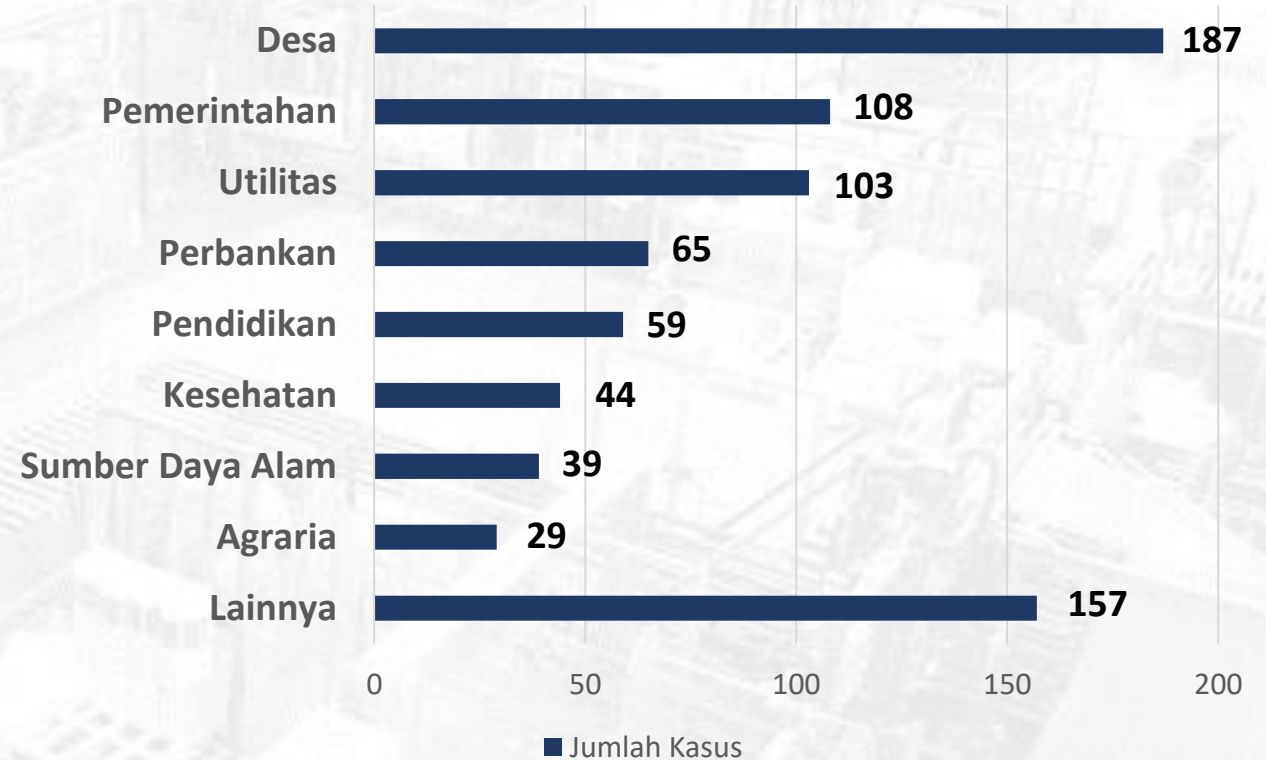
2023

1,695
tersangka

Rp. 28,4 triliun
Kerugian negara

- Kerugian negara akibat kasus korupsi mencapai Rp238,14 triliun selama 10 tahun terakhir (2013-2022)
- Tahun 2023, penindakan kasus korupsi meningkat **36,6%**, atau meningkat 212 kasus dari tahun sebelumnya

Kasus korupsi berdasarkan sektor (2023)



**Dampak
Korupsi pada
Pasar**



Merusak
kepercayaan
investor



Meningkatkan
biaya bisnis



Menghambat
pertumbuhan
ekonomi



Menciptakan
pasar yang
tidak adil

Kondisi demokrasi politik Indonesia menantang bagi pasar (2): Birokrasi

Sistem Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA) masih menyulitkan

Kurangnya komitmen K/L

Platform teknologi informasi tidak sinergi

Tantangan reformasi struktural: Regulasi, Perizinan & Konsistensi Kebijakan

1 Regulasi Perizinan menyebabkan *Business Uncertainty*

- Jumlah perizinan yang banyak
- Prosedur yang panjang
- Biaya yang besar dan kurangnya transparansi

2 Disharmonisasi antara Pusat dan Daerah

- Inkonsistensi kebijakan pusat dan daerah
- Perbedaan interpretasi kebijakan

3 Sosialisasi dan diseminasi kebijakan tidak optimal

- Harus dilakukan secara efisien dan terpadu

Inkonsistensi kebijakan

Permendag
36 tahun
2023

Judicial
review
UUCK

TAPERA

SURVEI ROADMAP PEREKONOMIAN APINDO 2024-2029

20,51%

inkonsistensi kebijakan dan kepastian hukum secara umum dinilai berisiko tinggi

5,53%

inkonsistensi kebijakan dan kepastian hukum secara umum dinilai berisiko sangat tinggi

Dampak birokrasi yang rumit & lambat pada pasar



Menghambat proses bisnis



Meningkatkan biaya operasional

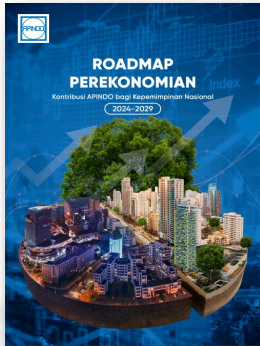


Mengurangi daya saing



Menciptakan ketidakpastian bagi investor

Kondisi demokrasi politik Indonesia menantang bagi pasar (3): Politik Transaksional



SURVEI ROADMAP PEREKONOMIAN APINDO 2024-2029

Hanya....

13,76%

Kualitas tata kelola yang melibatkan dunia usaha dalam perencanaan pembangunan dinilai baik/tinggi

13,32%

Kualitas tata kelola yang melibatkan dunia usaha dalam penganggaran pembangunan dinilai baik/tinggi

Dampak politik transaksional pada kemajuan ekonomi



Mengalihkan fokus dari *good policies* ke kepentingan pribadi



Menciptakan sistem *patronage* yang tidak adil



Merugikan masyarakat luas



Melemahkan kepercayaan publik terhadap institusi

Dunia usaha menghadapi isu struktural ditengah tantangan kondisi demokrasi politik saat ini: Penciptaan Lapangan Kerja

Tren Investasi dan Penyerapan Tenaga Kerja

Tahun	Investasi (Rp/Triliun)	Jumlah Tenaga Kerja (orang)	Penyerapan/Triliun (orang)
2013	398.3	1,829,950	4,594
2014	463	1,430,846	3,090
2015	545.4	1,435,711	2,632
2016	613	1,392,398	2,271
2017	692.8	1,176,353	1,698
2018	721.3	960,052	1,331
2019	809.6	1,033,835	1,277
2020	826,3	1,156,361	1,371
2021	901	1,207,893	1,340
2022	1207	1,305,001	1,081
2023	1418,9	1,823,543	1,285
Q1-2024	401,5	547,419	1,363

Kecenderungan penyusutan daya serap tenaga kerja yang tinggal ‘seperempat’ hanya dalam 9 (sembilan) tahun

2013 4,594 tenaga kerja /triliun

2022 1,081 tenaga kerja /triliun

Di tahun 2023, terjadi sedikit peningkatan dengan setiap 1 triliun investasi menciptakan 1.285 tenaga kerja. Pada Q1-2024, terjadi peningkatan kembali dengan 1,363 penyerapan/triliun investasi

Dunia usaha menghadapi isu struktural ditengah tantangan kondisi demokrasi politik saat ini: Pembangunan SDM

Human Development Index (HDI), ASEAN countries (2022)

Global Rank	Country	HDI Value
12	Singapore	0,939
51	Brunei Darussalam	0,829
62	Malaysia	0,803
66	Thailand	0,800
114	Indonesia	0,705
115	Vietnam	0,703
116	Philippines	0,699
140	Laos	0,607
146	Cambodia	0,593
149	Myanmar	0,585

Indonesia salah satu negara dengan produktivitas terendah di ASEAN



U\$ 23,87 ribu/tenaga kerja
ASEAN U\$ 24,27 ribu/tenaga kerja

Distribusi penduduk bekerja menurut pendidikan (2023)



Warning!

Menuju Indonesia Emas 2045.....



9,9 juta

Gen-Z justru menganggur

22,25% dari total 44,47 juta anak muda generasi Z.

Dunia usaha menghadapi isu struktural ditengah tantangan kondisi demokrasi politik saat ini: Digitalisasi

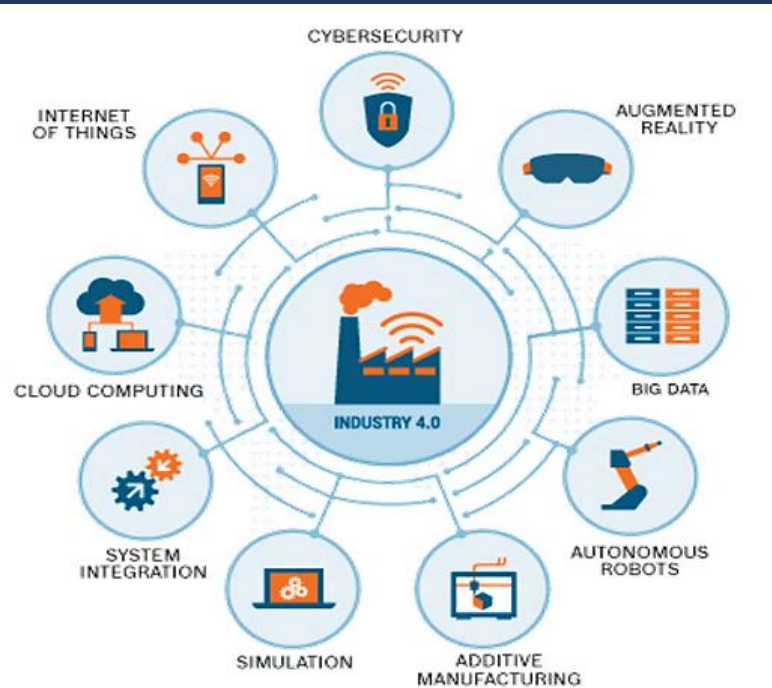
79%

CEO Asia Pasifik menyatakan mengubah fokus investasi mereka dalam 3 tahun ke depan ke arah *digital transformation* (PWC, 2022)

#47

Peringkat Indonesia dalam *Digital Skills Gaps Index* (DSGI) 2021, dengan nilai yang rendah pada intensitas riset/penelitian (skor 3,6/10), dan dukungan pemerintah (skor 4,5/10)

Shifting teknologi



Sumber: WEF

Key roles for business transformation

Roles most selected by organizations surveyed (as either growing, stable or declining), ordered by net role growth, and their net growth and structural churn (percent)

ROLES	NET GROWTH -50% 0 50%	ECONOMY CHURN	GLOBAL CHURN
AI and Machine Learning Specialists		39%	40%
Business Development Professionals		39%	24%
Data Analysts and Scientists		38%	34%
Industrial and Production Engineers		18%	15%
Project Managers		33%	25%
General and Operations Managers		19%	14%

Isu struktural adopsi digital di Indonesia (untuk UMKM, Daerah Tertinggal, dan Perempuan)



Digital Infrastructure



Digital literacy



Cost of trial and error of
tech adoption



Protection of basic digital
rights & cybersecurity



Gender Disparity

Merumuskan kembali peran negara, pasar, dan masyarakat sipil dalam demokrasi



ESG



Mindset Dunia Usaha (3P + 1C)



Profit



People



Planet



Community

Peran Dunia Usaha



Implementasi
praktik
berkelanjutan



Inovasi
dan Investasi



Transparansi dan
Pelaporan (ESG
Report)

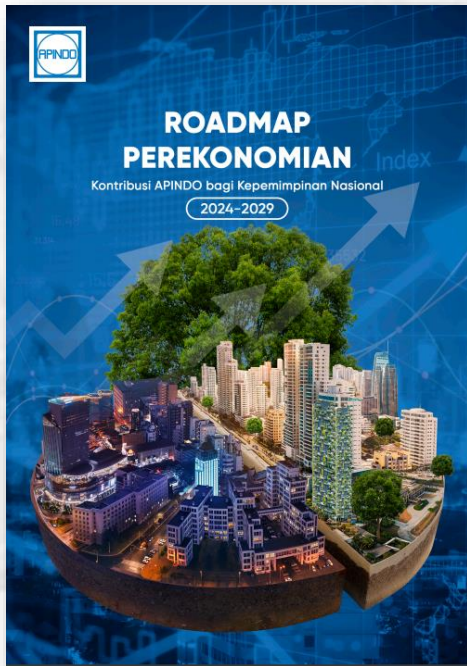
Dunia Usaha



Pemerintah, Masyarakat, Akademisi

Dunia usaha berkomitmen turut memajukan demokrasi politik Indonesia

PRIORITAS ROADMAP APINDO



Kepastian hukum serta perbaikan kelembagaan dan koordinasi

Kebijakan terkait peran teknologi dan SDM untuk mendukung lompatan produktivitas

Optimalisasi kebijakan industri, perdagangan, investasi, dan persaingan yang sehat

Keberadaan infrastruktur, transisi energi, dan tersedianya sarana dan prasarana digital

Adopsi ESG oleh bisnis dan mengembangkan industri hijau

Kepastian hukum serta perbaikan kelembagaan dan koordinasi **REKOMENDASI**

1. Membuat konsultasi sistematis di setiap tahap, termasuk jeda waktu pemberlakuan
2. Penyempurnaan di setiap tahap dengan rekomendasi kongkrit: e.g. peningkatan penerimaan negara bertahap melalui perbaikan administrasi dan ekstensifikasi berbasis keadilan
3. Evaluasi beban penerapan regulasi yang berbeda antara perusahaan besar, UMKM
4. Peningkatan koordinasi: contoh UMKM (24 K/L), timnas dan lembaga baru

Dunia usaha berkomitmen turut memajukan demokrasi politik Indonesia (2)



KAKI KOALISI
ANTI
KORUPSI
INDONESIA



IICD Indonesian
Institute for
Corporate Directorship

APINDO MEMBERS GATHERING MELINDUNGI BISNIS DARI SUAP DAN KORUPSI:

**“MEMAHAMI DAMPAK UNDANG-UNDANG ANTIKORUPSI TERHADAP
BISNIS & EFEKTIVITAS SISTEM ANTI SUAP UNTUK MELINDUNGI PERUSAHAAN”**

Adopsi Anti Bribery Management System (ABMS)

Sertifikasi ISO 37001:2016



Compliance

Meningkatkan kredibilitas dan reputasi perusahaan

Menghindari biaya tidak perlu

Meningkatkan dan menguatkan sistem manajemen organisasi

Memiliki prosedur penanganan penyuapan



Terima kasih

Contact

Employer Association of Indonesia
Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO)
Permata Kuningan Building, Lt. 10
Jl. Kuningan Mulia Kav. 9C
Guntur – Setiabudi
Jakarta Selatan 12980
Tel. (62) 21 8378 0824,
Fax. (62)21 8378 0823/8378 0746
Website : www.apindo.or.id